

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

PERCEPATAN INVENTARISASI BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT DAN PEMETAAN BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT DENGAN MEMPERKUAT METODE PENGAWASAN



NAMA : SUBUR YUSRA, S.Si., M.Sc.
NIP : 19810912 200604 1 002
JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aksi Perubahan dengan judul:

**PERCEPATAN INVENTARISASI BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT
DAN PEMETAAN BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT DENGAN
MEMPERKUAT METODE PENGAWASAN**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023
Gelombang 2 Angkatan III,

Nama : SUBUR YUSRA, S.Si., M.Sc.
NIP : 19810912 200604 1 002
Jabatan : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN
Satuan/Unit Kerja : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BANJAR

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Rancangan
Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Rabu tanggal 04 Oktober
2023

Menyetujui:

Bogor, 04 Oktober 2023

COACH



Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc.
NIP. 198603242009121004

Martapura, 04 Oktober 2023

MENTOR

Muhammad Irfan, S.H., M.H.
NIP. 19680517 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat serta kauniannya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan yang berjudul “Percepatan Inventarisasi Bidang Tanah Bersertipikat dan Pemetaan Bidang Tanah Bersertipikat dengan memanfaatkan Kurva S Sebagai Pengawasan” dengan lancar. Rancangan Aksi Perubahan ini disusun sebagai salah satu syarat penilaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.


Dalam proses Penyelesaian Rancangan Aksi Perubahan ini, terdapat banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Bapak Muhammad Irfan, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
3. Bapak Akhmad Misbakhul Munir, S.T., M.Sc. selaku Coach yang telah memberikan bimbingan, saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan Rancangan Aksi Perubahan ini
4. Rekan-rekan Kerja pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang terus mendukung dan memberikan data terbaru selama Pendidikan berlangsung
5. Mamah, terimakasih atas segala pengorbanan dan curahan kasih sayangnya
6. Istri, Kakak, Abang dan Carin, yang tetap membuat semangat
7. Para Widyaswara di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah mengajarkan wawasan baru.
8. Rekan-rekan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III tahun 2023, yang membuat penulis merasa bersenang-senang di Pendidikan ini
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulisan Rancangan Aktualisasi ini

Penulis menyadari bahwa Rancangan Aksi Perubahan ini masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan banyak asran dan kritik yang membangun untuk pengembangan Rancangan Aksi Perubahan ini.

Bogor, 04 Oktober 2023

Peserta Diklat PKP Angkatan III



Subur Yusra, S.Si., M.Sc.

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN	2
Daftar Tabel	7
Daftar Gambar	7
BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tujuan Aksi Perubahan	8
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan.....	9
D. Analisis Masalah.....	9
a. Penetapan Masalah Utama.....	11
E. Strategi Penyelesaian Masalah	15
1. Terobosan/Inovasi	15
F. Pemetaan Sikap Perilaku.....	16
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	18
A. Pembangunan Integritas.....	18
i. Membangun tim efektif	20
ii. Membuat alur kerja dan pengawasan	22
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)	22
C. Pengelolaan Tim.....	23
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	25
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik	25
1. Inventarisasi	25
2. Scan	28
3. Analisa Pemetaan.....	28
B. Manfaat Aksi Perubahan.....	34
C. Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan.....	35
D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan	36
E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri.....	36
BAB IV DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	38
A. Penerapan Strategi Komunikasi	38
Berdasarkan dari kegiatan komunikasi yang dipelajari dari orang orang besar yang berpengalaman, bersikap tenang dan logis dan berusaha merangkul penanya adalah hal yang paling baik dalam melakukan diskusi atau tanya-jawab.....	38
Salah satu contoh komunikasi yang diterapkan oleh penulis adalah ketika penulis mengharuskan menutup berkas pengukuran ulang dikarenakan mengalami perubahan signifikan secara 1 blok yang terdiri dari 10 bidang bersertipikat sementara yang memohon pengukuran ulang 1 sertipikat. Dengan kondisi ini penulis harus bisa memberikan pemahaman kepada pemohon agar mau menutup	

berkasnya dengan baik (
<https://drive.google.com/file/d/1ghmdVz2NPLZMs45wgmIuer6xQh0dUpel/view?usp=sharing>). 38

B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan 38

Dukungan ini dibuktikan dengan salah satu video dari pegawai PPAT yang merasa terbantu dengan kegiatan pemetaan bidang tanah terdaftar bersertipikat (

https://drive.google.com/file/d/13iA5nLMZH_KU0PsbJbFofG30q7vv-Ojw/view?usp=sharing).. 38

Seiring jumlah bidang tanah terdaftar bersertipikat makin banyak terpetakan maka proses kegiatan pertanahan lainnya akan menjadi lebih mudah, integritas petugas pemetaan sangat dibutuhkan demi terciptanya data pertanahan yang lengkap. 38

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan..... 39

DAFTAR PUSTAKA 41

Daftar Tabel

Table 1. Identifikasi Masalah pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kabupaten Banjar.....	11
Table 2. Penetapan masalah utama dengan metode USG	13
Table 3. Tim Efektif	16
Table 4. Komposisi Tim Efektif	21
Table 5. model tabel inventarisasi	22
Table 6. Model tabel scan	22
Table 7. Model tabel Analisa Pemetaan	22
Table 8. Target Kumulatif vs Realisasi Kumulatif Inventariasi	25
Table 9. Target VS Realisasi Kumulatif Inventarisasi Petugas Supri.....	26
Table 10. Target vs Realisasi Kumulatif Inventarisasi Petugas Budi	27
Table 11. Perubahan/Peningkatan Kompetensi Petugas Pelaksana.....	35
Table 12. Time tabel kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka pendek.....	39

Daftar Gambar

Gambar 1. Metode Fishbone dalam mencari akar permasalahan	13
Gambar 2. Penilaian Kompetensi Penulis tahun 2021.....	16
Gambar 3. Rapat Awal sekaligus Laporan Hasil Pendidikan PKP	18
Gambar 4. Rapat Awal Lanjutan untuk menentukan acuan data dasar yang dipakai.....	19
Gambar 5. Hambatan pengambilan data bidang tanah bersertipikat dan belum Scan tidak ada	19
Gambar 6. SK Tim Efektif	20
Gambar 7. Pekerjaan dan Pengawasan dalam satu sistem	23
Gambar 8. Penjelasan kepada Petugas tentang cara Kerja Aksi Perubahan	24
Gambar 9. Pembagian tugas sudah terisi dengan data per nama petugas	24
Gambar 10. Kurva Janny 10 Hari.....	26
Gambar 11. Kurva S Supri 10 Hari.....	27
Gambar 12. Kurva S petugas Budi 10 Hari	28
Gambar 13. Kurva S petugas Adit Analisa Pemetaan 10 hari	29
Gambar 14. Kurva S Petugas Edgar 10 Hari analisa	30
Gambar 15. Kurva S petuga Ganda 10 Hari	30

BAB I RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RAP)

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdapat 7 tujuan strategis yang satu diantaranya akan sangat berpengaruh terhadap 6 tujuan lainnya jika dilakukan dengan benar. Tujuan tersebut adalah mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia.

Dalam mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia, **diperlukan basis data yang lengkap, tercatat dan terukur dengan baik**. Berdasarkan hal tersebut diperlukan strategi strategi yang benar dan menyeluruh (*holistic*) sebelum melakukan kegiatan layanan pertanahan yang aman dan berkualitas.

Berdasarkan Permen ATR/Ka.BPN Nomor 16 tahun 2021, selama tahun 2022 kantor pertanahan kabupaen Banjar menerima permohonan plotting bidang tanah bersertipikat dari pemohon sebanyak 194 permohonan yang dilakukan melalui penunjukkan pemohon di lapangan. Dari fakta satu tahun tersebut dapat dilihat laju pemetaan bidang tanah bersertipikat sangat rendah.

Efek dari pemetaan bidang tanah bersertipikat tidak dilakukan dengan cepat sementara pelayanan pertanahan terus berjalan adalah berdasarkan data seksi sengketa di kabupaten Banjar, perkara yang ditangani spesifik pada Kelurahan Gambut merupakan yang terbanyak sepanjang 5 tahun terakhir dibandingkan desa desa dan Kelurahan lainnya dan semuanya dikarenakan permasalahan tumpang tindih dengan sertipikat lama.

Dengan data yang begitu besar dan Sumber Daya Manusia yang ada dan pelayanan pertanahan yang terus berjalan dari waktu ke waktu dibutuhkan alur kerja yang sederhana yang realistis serta pengawasan yang terukur dan tercatat dalam memetakan bidang tanah bersertipikat.

B. Tujuan Aksi Perubahan

1. Jangka Pendek adalah membentuk alur kerja pemetaan bidang tanah bersertipikat dan mengimplementasi alur kerja tersebut secara terukur bidang per bidang pada kelurahan gambut sebanyak 1000 bidang
2. Jangka menengah adalah terbiasanya petugas arsip dan pegawai survei dan pemetaan dalam memetakan bidang tanah bersertipikat secara terstruktur dan tercatatnya dan terpetakannya bidang tanah bersertipikat sebanyak 10.000 bidang dalam 1 tahun

3. Jangka Panjang adalah tercatatnya dan terpetakannya seluruh bidang tanah bersertipikat(62.520 bidang) pada kabupaten banjar dalam waktu 5 tahun

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Sebagaimana telah tersebut di latar belakang pada kelurahan Gambut secara data komputersisasi kantor pertanahan terdapat 62.520 atau sekitar 28% bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan.

Berdasarkan data tersebut secara persentase mungkin terlihat tidak banyak bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan akan tetapi jika dilihat dari unsur hukumnya setiap sertipikat yang terbit adalah produk hukum, sehingga satu saja produk hukum tersebut tidak terpetakan akan berdampak hukum baik secara perdata dan atau pidana bagi pemilik tanah dan Aparatur Sipil Negara.

Dikarenakan waktu aktualisasi yang cukup terbatas dan bukti data dari seksi sengketa mengenai perkara terbanyak, penulis membatasi diri memilih kelurahan Gambut sebagai lokasi untuk dilakukan aksi perubahan. penulis membatasi diri dengan melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang tanah bersertipikat menjadi 1000 bidang tanah bersertipikat yang sampai terpetakan.

D. Analisis Masalah

Dengan Analisa Pestel tersebut sudah sangat cukup melihat pentingnya melakukan memetakan bidang tanah bersertipikat dengan tepat dan cepat agar permasalahan tidak semakin bertambah dan pelayanan pertanahan bisa berjalan dengan lebih baik.

Fokus kepada tugas pokok dan fungsi seksi Survei dan Pemetaan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020, didapat isu isu dilapangan sebagai berikut:

	Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Survei dan Pemetaan	Kondisi	Isu/Gap	Kondisi yang diharapkan	Indikator	Manfaat
	melaksanakan pengukuran	150 bidang pengukuran baru	banyak (564)	tidak ada	nol tunggal	Pelayan

	ran bidang	66 bidang pengukura n ulang	tungg akan	tungga kan	kan sur vei dan pe me taa n	an ses uai SO P
	melaksa nakan pemetaa n bidang	155.218 bidang tanah bersertipik at terpetakan (71%)	Laju Invent arisasi Bidan g tanah Berse rtipik atdan Peme taan Bidan g tanah berse rtipik at masih lamba t	Seluru h bidang tanah berser tipikat terdat a & terpet akan	62. 508 bid ang tan ah ter pet aka n	ke pa sti an po sisi bid an g ta na h be rse rti pik at ter hin da r pe rm as ala ha n hu ku m
	memelih ara kerangk a dasar kadastra l Nasional (KDKN)	KDKN HILANG,K DKN RUSAK, KDKN BERUBAH POSISI	pengu kuran mem butuh kan waktu lebih lama jika	merap atkan dan memp erbaiki KDKN	ju mla h KD KN yan g dip erb	Ku alit as da ta me nja di leb

			harus mengikat dengan KDKN		aiki dan dir apa tka n	ih bai k
	melaksanakan pengukuran batas administrasi	belum ada permohonan dari pemerintah daerah untuk diikutsertakan	BPN bukan walid ata untuk batas Admisitrasi	BPN dilibatkan dalam pengukuran batas administrasi	kerja sama dengan pemerintah daerah	ku alit as ba tas ad mi nis tra si me nja di leb ih bai k
	melaksanakan pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi	Peraturan Baru PMA 16/2021 belum sepenuhnya dipahami petugas ukur	Petugas ukur belum memahaminya secara menyeluruh ttg peraturan baru	tenaga teknis surveyor memahaminya PMA 16/2021 beserta juknis mitigasinya	gamb ar ukur terisi ses uai dengan peraturan per un dan gan	me m pe rce pa t pr os es pe rjal an an be rka s

Table 1. Identifikasi Masalah pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kabupaten Banjar

a. Penetapan Masalah Utama

Dari tabel 1, Dengan menggunakan metode Urgensi, Seriousness dan Growth (USG) akan ditetapkan permasalahan utama yang akan dijadikan

permasalahan utama. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara penggunaan metode ini adalah dengan menentukan tingkat skala tertentu (misal 1-5) pada:

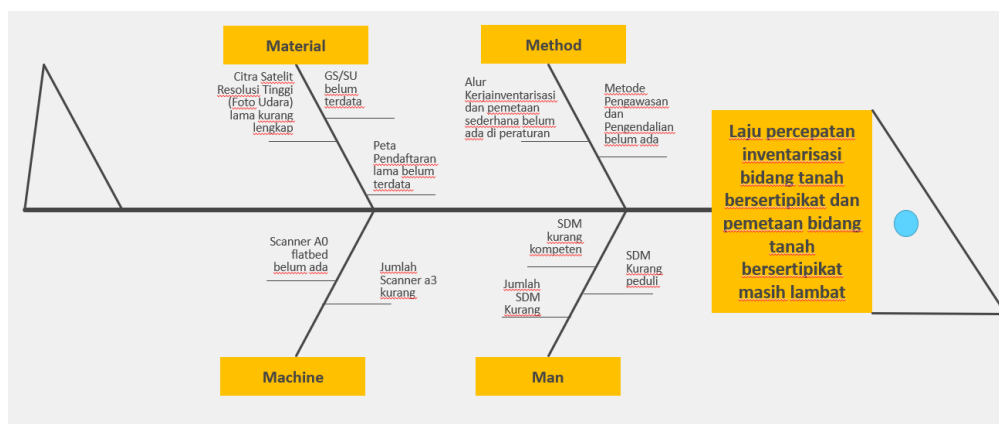
1. Urgensi: yaitu seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Pada skala 5 jika sangat mendesak, skala 4 jika mendesak, skala 3 kurang mendesak, skala 2 tidak mendesak, skala 1 sangat tidak mendesak karena sudah tergantikan oleh teknologi yang lain atau bukan tupoksi utama.
2. Seriousness: yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan. Pada skala 5 jika berpotensi besar efek pidana jika tidak segera dipecahkan, skala 4 jika berpotensi kecil efek pidana & besar efek perdata jika tidak segera dipecahkan, skala 3 minim berpotensi efek pidana & Perdata tapi berpengaruh signifikan kepada serapan anggaran jika tidak segera dipecahkan, skala 2 minim berpotensi pidana & perdata dan minim berpengaruh pada serapan anggaran, skala 1 anggaran yang minim dan atau sudah tergantikan oleh teknologi yang lain atau kantor pertanahan bukan leading sector
3. dan perkembangan: yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Skala sangat berpotensi berkembang kepada permohonan lainnya dan seksi lainnya dan masyarakat, skala 4 berpotensi kepada permohonan lainnya dalam satu seksi, seksi lain dan masyarakat, skala 3 kurang berpotensi kepada seksi lain, satu seksi dan masyarakat, skala 2 minim berpotensi pada seksi lainya dan masyarakat, skala 1 kantor pertanahan tidak berperan utama.

No.	Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Total
1	Banyak (564) tunggakan	4	3	4	11
2	Laju percepatan inventarisasi bidang tanah bersertipikat dan pemetaan bidang tanah bersertipikat masih lambat	5	5	4	14
3	pengukuran sulit dilakukan jika harus mengikat dengan KDKN	3	1	2	6

4	BPN bukan walidata untuk batas Admistrasi	1	1	2	4
5	Petugas ukur belum memahami secara menyeluruh ttg peraturan baru	4	4	2	10

Table 2. Penetapan masalah utama dengan metode USG

Kemudian, dari Analisa USG diteliti lagi akar masalah yang ada dengan metode fishbone dari Ishikawa, Japan, agar diketahui hubungan causal dan effect dari permasalahan laju percepatan inventarisasi bidang tanah bersertipikat dan pemetaan bidang tanah bersertipikat yang masih lambat.



Gambar 1. Metode Fishbone dalam mencari akar permasalahan

Penyebabnya dari beberapa faktor:

Material:

- Data Penginderaan Jauh (Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan Foto Udara (FU) dengan Time Series lama (pengambilan data penginderaan jauh di bawah tahun 2003) sulit di dapat. Data penginderaan jauh lama lebih dapat merepresentasikan sertipikat lama untuk dilakukan pemetaan bidang tanah bersertipikat dibandingkan dengan menggunakan data penginderaan jauh baru.
- Data mengenai Gambar Situasi, Gambar Tanah, Surat Ukur, Surat Ukur Sementara, belum terinventarisasi dan tercatat dengan baik, sehingga sangat sulit untuk memulai starting poin pelaksanaan pemetaan bidang tanah bersertipikat yang tersistematis dan terukur lajunya

- c. Peta Pendaftaran Lama belum terinventarisasi dengan baik. Peta pendaftaran lama sangat membantu dalam memetakan bidang tanah bersertipikat secara massal, walaupun banyak peta pendaftaran tanah yang tidak ditandatangani pejabat terkait pada saat itu. Walaupun demikian masih ada manfaatnya sebagai rujukan pencarian GS,SU,GT,SUS sebagaimana huruf b secara lebih terstruktur. Tapi pada saat ini peta pendaftaran di kabupaten Banjar belum terinventarisasi dengan baik

Machine:

Untuk mendigitalkan peta pendaftaran agar mudah dibuat vektornya secara massal, dibutuhkan scanner Flatbed ukuran A0 yang sehingga tidak ada distorsi. Untuk GS, GT, SU, SUS diperlukan scanner A3 dengan kecepatan tinggi sehingga dalam transformasi bidang tanah ke digital menjadi lebih cepat dan mempercepat proses pemetaan bidang tanah bersertipikat, untuk scanner flatbed kantor pertanahan kabupaten banjar belum punya, sedangkan scanner a3 kantor pertanahan mempunyai satu.

Man:

Di butuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai pengalaman dengan inventarisasi arsip dan SDM dengan latar belakang pengukuran dan pemetaan serta pengalaman dalam melakukan plotting peta atau pengembalian batas. Walaupun personil seksi survei dan pemetaan cukup banyak akan tetapi dengan tanggung jawab ptsl, redis, rutin dan lain sebagainya, jumlah personil masih dianggap kurang memadai. Fakta petugas ukur di Kabupaten Banjar banyak yang belum berpengalaman dalam plotting.

Method:

- a. Alur Kerja inventarisasi dan pemetaan bidang tanah bersertipikat belum ada.

Sebagaimana telah disebut pada bab awal, sejak PMA nomor 16 tahun 2021 berlaku Bahasa plotting/pemetaan secara harfiah disebutkan. Tetapi secara alur kerjanya belum diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

- b. Metode Pengawasan dan Pengendalian dalam penyelesaian Pekerjaan belum ada

Jika tidak ada metode pengawasan dan pengendalian dalam penyelesaian pekerjaan, hampir dapat dipastikan kegiatan inventarisasi dan pemetaan

tidak tercatat dan terukur peningkatannya, serta konsistensi pelaksana tidak bisa termonitor secara berkala.

Faktor faktor tersebut yang mengakibatkan Laju Inventarisasi dan Pemetaan bidang tanah bersertipikat menjadi lambat.

E. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan/Inovasi

Pada Permen. ATR/BPN No. 16 tahun 2021 pasal 43 ayat 3 disebutkan secara garis besar bahwa upaya pemetaan bidang tanah terdaftar (plotting) dan pemetaan kembali (replotting) bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Dengan cara peningkatan kualitas data (ada di petunjuk teknis PTSL tapi tidak ada di kegiatan rutin)
- b. Permohonan dari pemohon yang bersifat pasif menunggu pemohon datang untuk ditunjukkan tanahnya.
- c. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pelayanan elektronik

Dengan adanya potensi permasalahan hukum tersebut, diperlukan inovasi dalam pemetaan bidang tanah terdaftar bersertipikat, yaitu:

1. Membuat alur kerja inventarisasi dan pemetaan bidang tanah bersertipikat yang sederhana dan diharapkan sustainable (berkelanjutan) dan melaksanakan alur kerja tersebut
 2. Membuat tim efektif dengan cara kerja yang sederhana pada tiap alur pemetaan bidang tanah bersertipikat
 3. Membuat alur proses pengawasan dan pengendalian yang sederhana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sederhana dan melaksanakan alur kerja tersebut
- i. Membuat alur kerja inventarisasi dan pemetaan bidang tanah bersertipikat yang sederhana dan berkelanjutan.

Kata “sederhana” dan “berkelanjutan” difokuskan kepada pengertian memanfaatkan SDM dgn peralatan yang ada dan tahapan pekerjaan pada tiap alur yang singkat dan diharapkan dengan alur yang sederhana, proses pemetaan bidang tanah bersertipikat bisa dikerjakan oleh siapapun dengan pengetahuan minimal dari Arsip dan survei, pemetaan secara terus menerus.

- ii. Membuat tim efektif agar tiap alur ada yang mengerjakan dengan inovasi komunikasi menggunakan teknologi inovasi & komunikasi

No	Posisi	Keterangan
1	Ketua Tim/Kepala Seksi S&P	Ketua Pembentuk Pemikir Penyelaras akhir
2	Korsub Pemetaan	Pengevaluasi Penyelidik Pekerja
3	Petugas Ukur/Pemetaan	Pekerja Pemetaan
4	PPNPN	Pekerja digitalisasi
5	Petugas Arsip	Pekerja Inventarisasi

Table 3. Tim Efektif

F. Pemetaan Sikap Perilaku

Berdasarkan hasil Kompetensi Manajerial Sosio Kultural hasil penilaian kompetensi pada tahun 2021, dari 9 aspek kompetensi hampir seluruhnya bernilai 2 dan yang bernilai 3 adalah pada aspek mengelola perubahan sebagaimana terlihat pada gambar 5

Aspek Kompetensi	Nilai	Standar	Gap
Integritas	2	2	0
Kerja Sama	2	2	0
Komunikasi	2	2	0
Orientasi pada Hasil	2	2	0
Pelayanan Publik	2	2	0
Pengembangan Diri dan Orang Lain	2	2	0
Mengelola Perubahan	3	2	1
Pengambilan Keputusan	2	2	0
Perekat Bangsa	2	2	0

Total Nilai : 19, JPM : 105,56 %, Kategori : Optimal
Anda tidak memiliki aspek di bawah standar

Gambar 2. Penilaian Kompetensi Penulis tahun 2021

Berdasarkan hasil Kompetensi Manajerial Sosio Kultural Hal hal yang perlu di kembangkan penulis dalam Rancangan Aksi Perubahan ini adalah pengembangan

kemampuan Komunikasi yang efektif baik dengan promoter, laten, aphantetic dan defendant.

BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Pembangunan Integritas

Agar aksi perubahan dapat berjalan dengan terstruktur di perlukan alur kerja yang sederhana, mudah dimengerti dan bisa dilakukan setiap pihak sehingga pengawas dapat memonitor setiap orang yang diberikan tanggung jawab pekerjaan secara optimal.

Untuk membangun pegawai yang berintegritas diperlukan rapat awal kepada kepada pimpinan dan rekan rekan kantor mengenai pentingnya aksi perubahan yang akan dilakukan dan efeknya kepada kantor pertanahan. Kegiatan ini dilakukan setelah kembali bekerja di kantor pertanahan kabupaten Banjar (Gambar 3)

Pada Rapat awal ini diperlukan untuk membangun integritas para pegawai terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan manfaat yang akan diraih jika telah dilaksanakan secara konsisten.



Gambar 3. Rapat Awal sekaligus Laporan Hasil Pendidikan PKP

Setelah melakukan rapat awal dengan pimpinan dan rekan kerja struktural dan fungsional pada tanggal 9-10 Agustus 2023 dilakukan Rapat awal Lanjutan dengan fokus membahas mengenai Analisa kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan bidang terdaftar bersertipikat, terutama mengenai acuan data yang dipakai dan kemampuan calon petugas dalam menyelesaikan bagian tugas yang akan dilakukan (Gambar 4)



Gambar 4. Rapat Awal Lanjutan untuk menentukan acuan data dasar yang dipakai

Pada rapat Lanjutan ini diperoleh kesimpulan bahwa:

1. berdasarkan hasil download data KW456 melalui ringkasan eksekutif dari www.aplikasi.atrbpn.go.id tidak dapat dilakukan karena terdapat error pada sistem tersebut sehingga data KW5 tidak dapat didownload
2. pada www.aplikasi.atrbpn.go.id bagian deokumen surat ukur tidak dapat query dan download secara langsung bidang mana saja yang sudah terscan dan belum terpetakan (KW456) (Gambar 5).

Gambar 5. Hambatan pengambilan data bidang tanah bersertipikat dan belum Scan tidak ada

3. Kesepakatan akhir diputuskan bahwa data awal/dasar yang dipakai dalam kegiatan inventarisasi berasal dari kiriman petugas Pusdatin di Bogor yang sudah terdeteksi KW456 dan data yang lain yaitu data bidang bersertipikat pada kelurahan Gambut yang sudah terscan atau belum. Dengan menggunakan pengolahan data Excel menggunakan “Countif” didapatkan data bidang tanah bersertipikat belum terpetakan (KW456) yang dapat diketahui sudah scan atau belum.
4. Berdasarkan hasil pengolahan data pada angka 3 terdapat 4069 bidang tanah bersertipikat yang belum terscan yang perlu diinventarisasi dan terdapat 5033 bidang tanah terdaftar bersertipikat yang belum terpetakan dan sudah discan surat ukur/gambar situasi/gambar tanah


Kerjasama tim awal bersama rekan kerja lainnya sehingga dapat menyimpulkan data dasar yang akan dipakai menunjukkan integritas total petugas ASN kabupaten Banjar dari kegiatan aksi perubahan ini. Karena mereka tahu betapa penting dan

wajibnya kegiatan ini untuk kegiatan pemeliharaan data lainnya dan untuk keamanan pegawai yang sedang bertugas.

Untuk mempermudah tim dalam bekerja pastikan data awal sudah tersedia. Tahapan tersebut adalah:

i. Membangun tim efektif

Setelah petugas sudah menyadari pentingnya aksi perubahan ini dan lebih berintegritas, dibentuklah tim efektif surat keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan (Gambar 6) yang mengikat dan kuat secara organisasi sehingga setiap petugas yang terlibat tertulis andil sehingga integritas mereka tertulis secara nyata dalam membangun dan memperbaiki Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 102.1/SK-63.03.UP.02.03/VIII/2023

**TENTANG
TIM EFEKTIF
PENUNJUKAN PETUGAS INVENTARISASI ARSIP, SCAN DAN PEMETAAN BIDANG
TANAH BERSERTIPIKAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Inventarisasi & Pemetaan bidang tanah bersertipikat dapat berjalan secara efisien, efektif maka dipandang perlu menunjuk pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-056.01.2.431422/2023 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Muqoy, Profound, Terpercaya

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
Nomor : 102.1/SK-63.03.UP.02.03/1/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	DITETAPKAN SEBAGAI
1	SUBUR YUSEA S.Si., M.Sc. NIP. 19810912 200604 1 002 Pemkina (IV/a)	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Pemimpin Proyek
2	WAKIP SUPRIONO NIP. 19710921 201408 1 001 Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Pengadministrasian Umum	Petugas Inventarisasi Arsip
3	BUDI UTOMO 199310172023 PPNPN	Asisten Pengadministrasian Umum	Petugas Inventarisasi Arsip
4	AHMAD MURJANI 199408052023 PPNPN	Asisten Pengadministrasi Umum (APU)	Petugas Inventarisasi Arsip
5	SOPHAN SAWI S.M. 199312252023 PPNPN	Asisten Pengadministrasi Umum (APU)	Petugas Scan
6	BAMBANG WAHYUDI S.Pd. 199708212023 PPNPN	Asisten Pengadministrasi Umum (APU)	Petugas Scan
7	ABDUL HALIM S.T. 199407182023 PPNPN	Operator Komputer (OK)	Petugas Scan
8	ADITYA BATU HANDONO, S.Tr. 1980110 201402 1 002 Penata Muda (III/a)	Penata Kadastral Pertama	Petugas Pemetaan
9	MAKS EDGAR DIRASAPUTRA 19870312 200912 1 003 Pangatur Tk.1 (II/a)	Pengadministrasi Pertanahan	Petugas Pemetaan
10	GANDA IRANDA Asisten Surveor Kadaster Berlisensi	Asisten Petugas Ukur	Petugas Pemetaan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANJAR**

Muhammad Irfan, S.H., M.H.
MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.H.
NIP. 19680517 199403 1 002

Muqoy, Profound, Terpercaya

Gambar 6. SK Tim Efektif

Agar kegiatan aksi perubahan inventarisasi & pemetaan bidang tanah terdaftar bersertipikat berjalan dengan baik diperlukan tim yang anggotanya adalah orang-orang yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan alur tugasnya masing-masing, dengan komposisi sebagai berikut:

Table 4. Komposisi Tim Efektif

No	Posisi	Keterangan
1	Ketua Tim/Kepala Seksi S&P	Ketua Pembentuk Pemikir Penyelaras akhir
3	Petugas Ukur/Pemetaan	Pekerja Pemetaan (Lama di Kantor Pertanahan)
4	PPNPN	Pekerja digitalisasi (Scan)
5	Petugas Arsip	Pekerja Inventarisasi

Petugas petugas yang tertulis di dalam SK adalah nama nama petugas yang berkompeten di tahapan dari aksi perubahan yang dikerjakan dibandingkan dengan rekan kerja lainnya.

Jika kegiatan ini bisa dilaksanakan, diharapkan bisa meningkatkan kualitas instansi Kantor Pertanahan. Dan dengan etika bekerja berasaskan Pancasila dan dalam tiap tahapan kegiatan dengan prinsip bela negara dan cinta tanah air dan bangsa sehingga diharapkan akan berdampak pribadi aparatur sipil negara dan organisasi.

ii. Membuat alur kerja

Alur kerja terbagi menjadi tiga bagian, Inventarisasi-Scan-Analisa Pemetaan. Model tabel inventarisasi sederhana yang diusulkan adalah

Nomor	Nomor hak	Keterangan	Tanggal
1	00001	Ditemukan/tidak ditemukan	

Table 5. model tabel inventarisasi

Model tabel scan sederhana yang diusulkan adalah

Nomor	Nomor hak	Status Scan	Tanggal
1	00001	Terscan/belum terscan	

Table 6. Model tabel scan

Model tabel Analisa Pemetaan yang diusulkan adalah

Nomor	Nomor hak	Keterangan	Tanggal
1	00001	Bisa dipetakan/Belum bisa dipetakan	

Table 7. Model tabel Analisa Pemetaan

Model sederhana tersebut diharapkan bisa mempermudah tiap tiap aparatur sipil negara dalam melakukan pekerjaannya dibutuhkan data awal yang memang sudah siap dan sudah terbagi pada tiap orang. Dengan model pengisian tabel yang transparan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa docs.google.com/spreadsheets/ diharapkan 3 model tabel tersebut dengan TIK dapat termonitor dengan transparan.

Ketua tim dan dapat memonitor kinerja dari tiap petugas dengan alat grafik Kurva “S”(gambar 7).

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

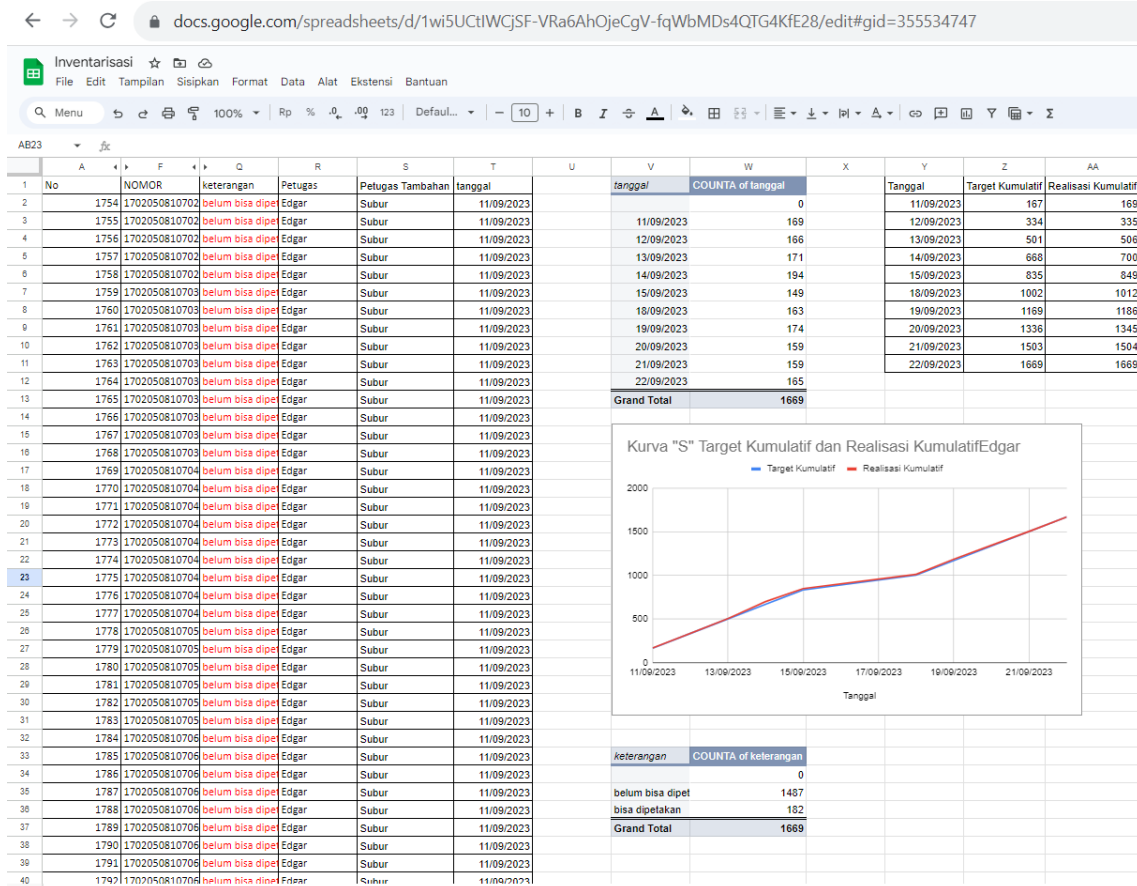
Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwa untuk memutuskan data dasar yang akan dipakai diperlukan kerja sama dan integritas yang luar biasa.

Untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan dalam pengawasan diperlukan TIK. Dalam hal ini penulis menggunakan docs.google.com/spreadsheets/ dimana semua petugas dapat mengisi hasil pekerjaannya dan ketua tim dalam hal ini pengawas dapat melihat kinerja dari masing masing petugas per hari.

Pada saat pengisian pertama kali terdapat beberapa kendala terutama dalam pengisian kata kata yang sama seperti ditemukan atau tidak ditemukan pada setiap baris juga tanggal pekerjaan, dimana petugas menggunakan fasilitas drag untuk jawaban

yang sama sehingga tanpa disadari meniban data yang telah terisi sebelumnya tanpa disadari di awal. Sehingga untuk antisipasinya diberi tahu kepada para petugas untuk tidak menggunakan fasilitas drag pada aplikasi spreadsheet online.

Penggunaan spreadsheet online ini sudah sering digunakan kantor pertanahan kabupaten Banjar terutama dalam mengandalkan crowd enlisting sebagai dasarnya. Hanya saja sekarang data yang dihadapi setiap petugas adalah ribuan record sehingga perlu ekstra kehati-hatian dalam mengisi data tersebut.



Gambar 7. Pekerjaan dan Pengawasan dalam satu sistem

C. Pengelolaan Tim

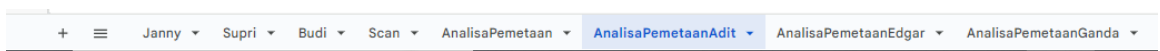
Dalam inisiasi pekerjaan awal setelah terbentuk SK tim efektif, diperlukan Briefing singkat terutama dalam mekanisme pekerjaan yang akan dilakukan dari setiap petugas tim efektif dan ketua tim agar para petugas tidak merasa terbebani dengan pekerjaan aksi perubahan ini (https://drive.google.com/file/d/1CuxkRK_HDabZ8l0aDOFG9EBzEWxbuuVx/view?usp=sharing). Penjelasan tersebut termasuk cara mengerjakannya dengan semudah mungkin (gambar 8)



Gambar 8. Penjelasan kepada Petugas tentang cara Kerja Aksi Perubahan

Sebagaimana dijelaskan dalam pembentukan tim efektif pada tabel 5, Petugas petugas yang berperan memang petugas yang sudah berpengalaman dalam bidangnya masing masing dari segi inventarisasi-scan-analisa pemetaan.

Pemilihan petugas ini akan menentukan kecepatan dari penyelesaian pekerjaan yang dibebankan kepada tiap petugas secara online. Agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif, ketua tim harus menyediakan data awal yang telah diberikan dalam TIK online sehingga petugas hanya tinggal mengisi saja (gambar 7&8)



Gambar 9. Pembagian tugas sudah terisi dengan data per nama petugas

BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

1. Inventarisasi

Berdasarkan data inventarisasi awal yang di dapat dari Pusat data dan Informasi terdapat 4.069 bidang tanah yang belum terinventarisasi dan belum terscan secara digital (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wi5UCtIWCjSF-VRa6AhOjeCgV-fqWbMDs4QTG4KfE28/edit?usp=sharing>). Secara data pada KKP akan sulit terlihat karena penyimpanan dari hasil inventarisasi masih bersifat desktop di kantor pertanahan. Ketika mencoba upload data hasil scan tidak bisa dilakukan oleh sistem.

Dari data tersebut petugas inventarisasi mencari surat ukur, gambar situasi, atau bukti bidang tanah bersertipikat lainnya sebanyak 1000 surat ukur dengan dasar pencarian berdasarkan nomor hak. Dari hasil pencarian didapatkan sebanyak 79 surat ukur didapatkan dari ketiga petugas ukur dengan rincian sebagai berikut:

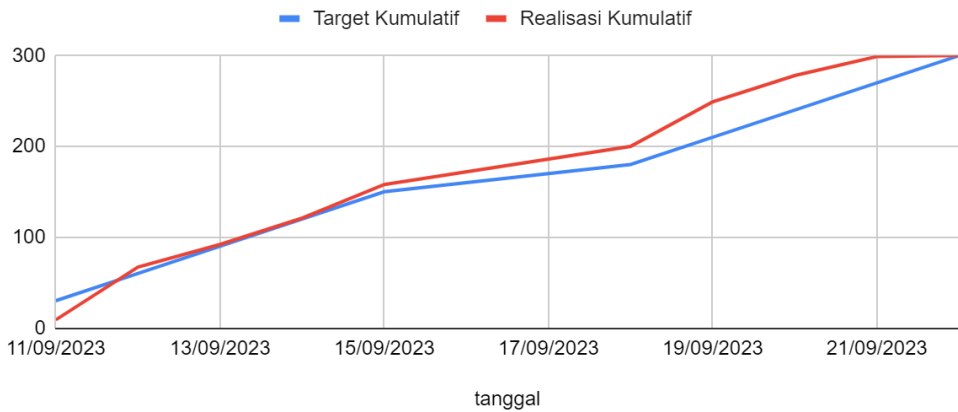
Petugas Janny

<i>tanggal</i>	COUNTA of tanggal	Target Kumulatif	Realisasi Kumulatif
11/09/2023	9	30	9
12/09/2023	58	60	67
13/09/2023	25	90	92
14/09/2023	29	120	121
15/09/2023	37	150	158
18/09/2023	42	180	200
19/09/2023	49	210	249
20/09/2023	29	240	278
21/09/2023	21	270	299
22/09/2023	1	300	300

Table 8. Target Kumulatif vs Realisasi Kumulatif Inventariasi

Dari 10 hari kegiatan inventarisasi terhadap 300 data yang telah diberikan untuk dicari fisiknya (table 8), didapatkan 48 berkas Surat ukur fisik dengan kinerja kurva S sebagai berikut:

KURVA "S" Target Kumulatif dan Realisasi Kumulatif JANNY



Gambar 10. Kurva Janny 10 Hari

Dari kurva tersebut dapat disimpulkan petugas Janny pada tahap awal kurang bisa mengikuti target yang di harapkan, akan tetapi dihari hari berikutnya petugas selalu di atas target yang telah ditetapkan

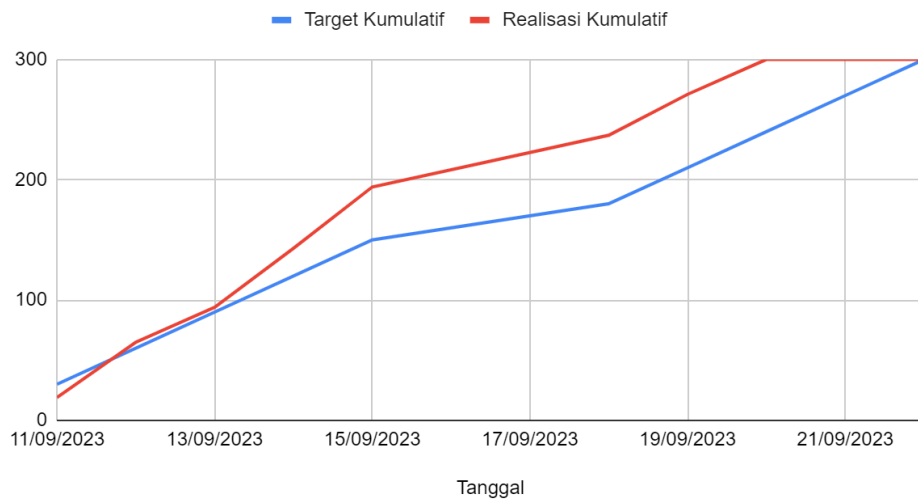
Petugas Supri

Tanggal	Realisasi	Target Kumulatif	Realisasi Kumulatif
11/09/2023	19	30	19
12/09/2023	46	60	65
13/09/2023	29	90	94
14/09/2023	49	120	143
15/09/2023	51	150	194
18/09/2023	43	180	237
19/09/2023	34	210	271
20/09/2023	29	240	300
21/09/2023	0	270	300
22/09/2023	0	300	300

Table 9. Target VS Realisasi Kumulatif Inventarisasi Petugas Supri

Dari 10 hari kegiatan inventarisasi terhadap 300 data yang telah diberikan untuk dicari fisiknya (table 9), Seluruh data tidak ditemukan fisik surat ukurnya, dengan kinerja kurva S sebagai berikut:

KURVA "S" Target dan Realisasi Kumulatif SUPRI



Gambar 11. Kurva S Supri 10 Hari

Dari kurva tersebut dapat disimpulkan petugas Supri pada tahap awal kurang bisa mengikuti target yang di harapkan, akantetapi dihari hari berikutnya petugas selalu di atas target yang telah ditetapkan.

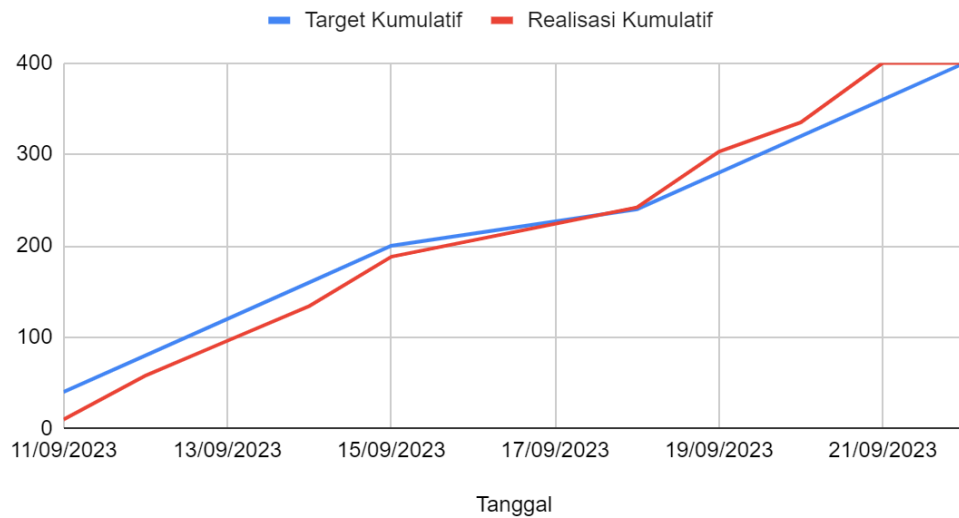
Petugas Budi

Tanggal	Realisasi	Target Kumulatif	Realisasi Kumulatif
11/09/2023	10	40	10
12/09/2023	48	80	58
13/09/2023	38	120	96
14/09/2023	38	160	134
15/09/2023	54	200	188
18/09/2023	54	240	242
19/09/2023	61	280	303
20/09/2023	32	320	335
21/09/2023	65	360	400
22/09/2023	0	400	400

Table 10. Target vs Realisasi Kumulatif Inventarisasi Petugas Budi

Dari 10 hari kegiatan inventarisasi terhadap 400 data yang telah diberikan untuk dicari fisiknya (table 10), didapatkan 31 berkas Surat ukur fisik dengan kinerja kurva S sebagai berikut:

KURVA 'S' Target Kumulatif dan Realisasi Kumulatif BUDI



Gambar 12. Kurva S petugas Budi 10 Hari

Dari kurva tersebut dapat disimpulkan petugas Budi pada beberapa hari kurang bisa mengikuti target yang di harapkan, akan tetapi dihari hari berikutnya petugas selalu di atas target yang telah ditetapkan bahkan selesai sebelum hari ke 10

2. Scan

Berdasarkan data scan pada (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wi5UCtIWCjSF-VRa6AhOjeCgV-fqWbMDs4QTG4KfE28/edit?usp=sharing>) didapatkan hasil yang sangat berbeda dengan tahapan lainnya, yaitu kegiatan scan sebanyak 79 surat ukur dapat dilakukan dalam satu hari sehingga tidak diperlukan pembagian kerja yang signifikan, proses scan telah di simpan di server survei dan pemetaan Kabupaten Banjar.

Untuk bidang tanah lainnya berdasarkan data pusdatin yang didapat sebanyak 5.033 surat ukur/GS/GT sudah terscan dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.

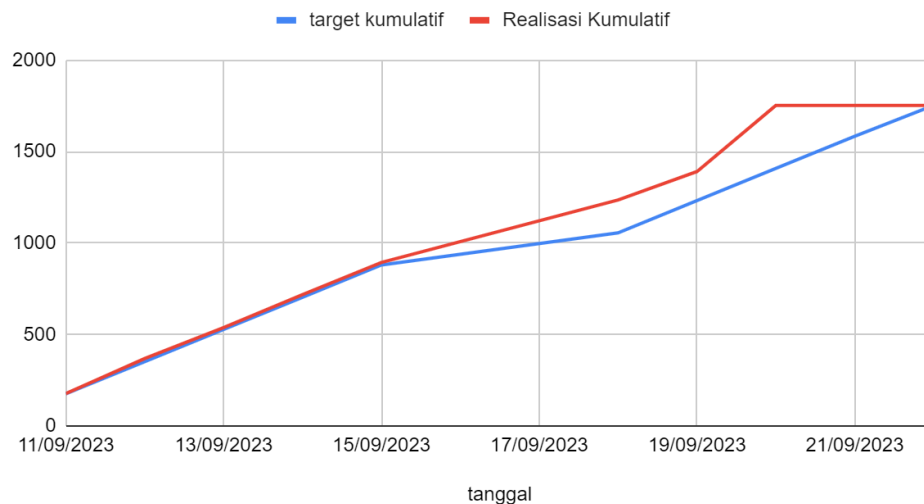
3. Analisa Pemetaan

Berdasarkan data Analisa pemetaan pada <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wi5UCtIWCjSF-VRa6AhOjeCgV-fqWbMDs4QTG4KfE28/edit?usp=sharing> didapatkan hasil bahwa dari 5.033

su/gs/gt yang telah terscan dianalisa dengan tiga petugas pemetaan yang memang sudah lama bekerja di kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

Petugas Adit, melakukan analisa pemetaan terhadap 1.753 surat ukur/Gambar situasi/Gambar Tanah, dan berdasarkan keahliannya sebagai petugas ukur dan petugas pemetaan menyatakan 272 bidang tanah terdaftar bersertipikat bisa dipetakan.

Kurva "S" target kumulatif dan Realisasi Kumulatif Adit

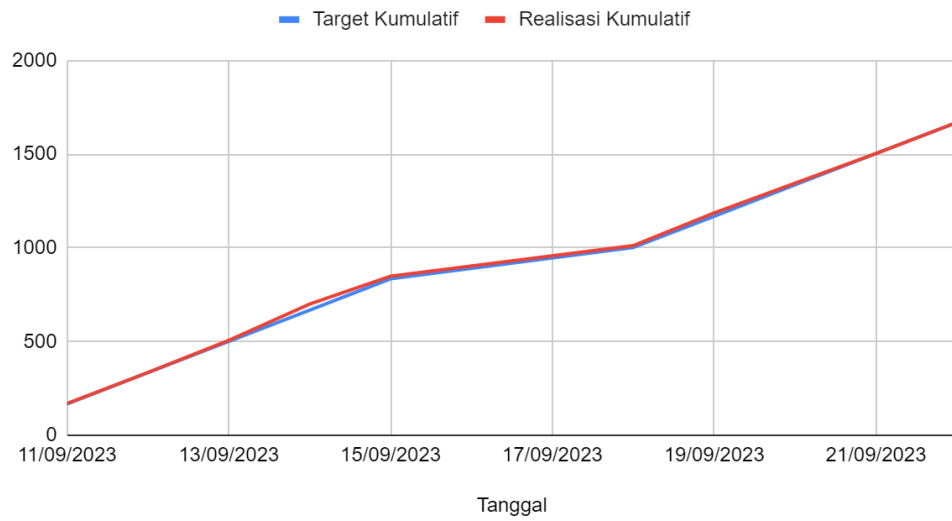


Gambar 13. Kurva S petugas Adit Analisa Pemetaan 10 hari

Dari kurva S Adit dapat disimpulkan dari hari ke hari selama 10 hari, petugas Adit meningkatkan kinerjanya hingga selesai menganalisa kurang dari 10 hari.

Petugas Edgar, melakukan analisa terhadap 1.669 surat ukur/Gambar situasi/Gambar tanah, dan berdasarkan keahliannya sebagai petugas ukur dan petugas pemetaan menyatakan 182 bidang tanah terdaftar bersertipikat bisa dipetakan.

Kurva "S" Target Kumulatif dan Realisasi Kumulatif Edgar

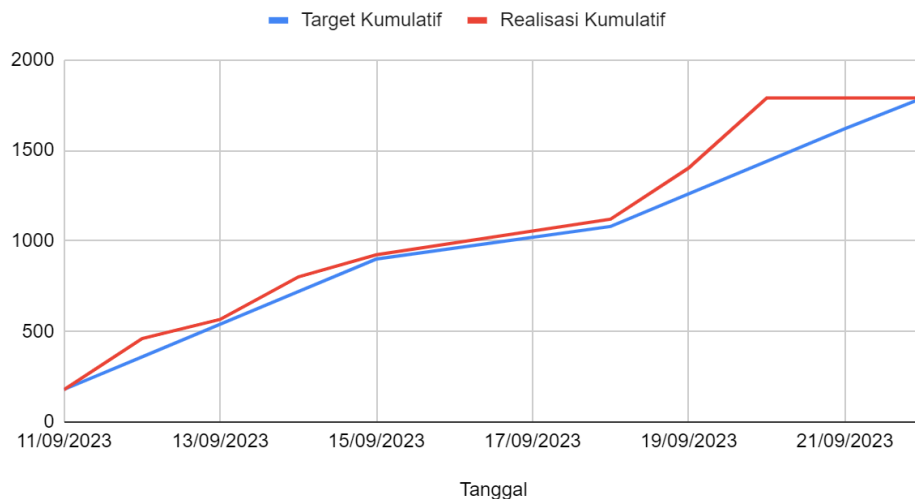


Gambar 14. Kurva S Petugas Edgar 10 Hari analisa

Dari kurva S Edgar dapat disimpulkan dari hari ke hari selama 10 hari, petugas Edgar Konsisten bekerja sedikit di atas target selama 10 hari.

Petugas Ganda, melakukan analisa terhadap 1.790 surat ukur/Gambar situasi/Gambar tanah, dan berdasarkan keahliannya sebagai petugas ukur dan petugas pemetaan menyatakan 486 bidang tanah terdaftar bersertipikat bisa dipetakan

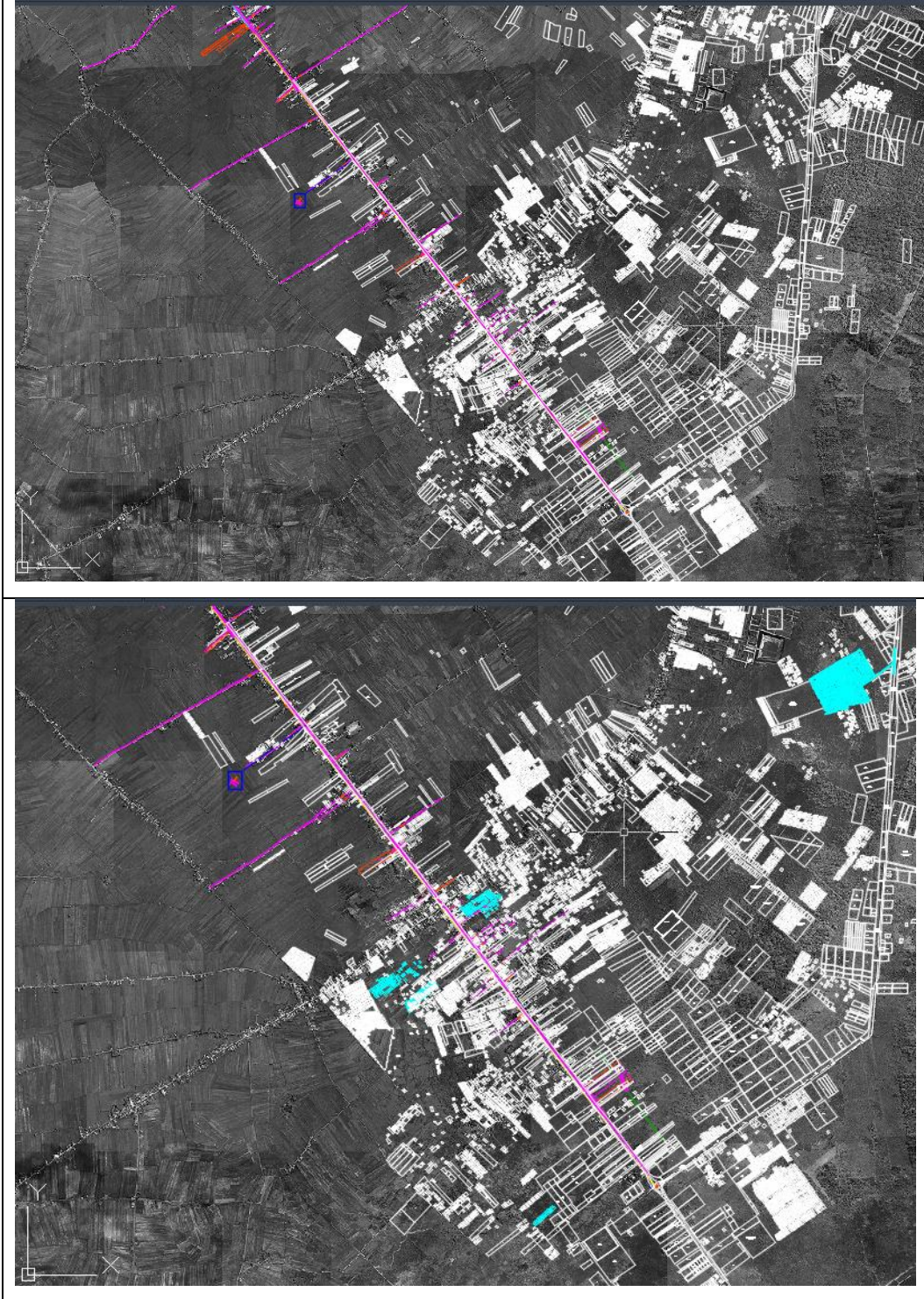
Kurva "S" Target Kumulatif dan Realisasi Kumulatif Ganda



Gambar 15. Kurva S petuga Ganda 10 Hari

Dari kurva S Ganda dapat disimpulkan dari hari ke hari selama 10 hari, petugas Ganda Konsisten bekerja di atas target harian dan selesai di hari ke sembilan.

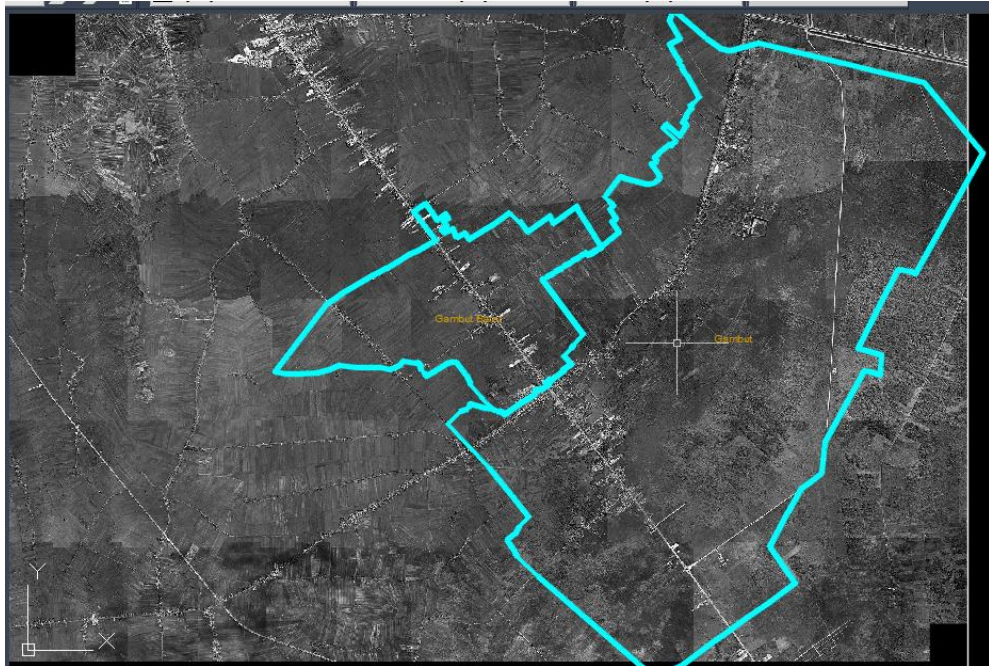
Berdasarkan data-data dari para petugas Analisa pemetaan didapatkan bahwa total 940 bidang tanah terdaftar bersertipikat bisa dipetakan. Berdasarkan Analisa tersebut bidang tanah yang sudah tergambar secara digital grafis online sebanyak 257 bidang tanah (warna Cyan).



Gambar 16. Kondisi sebelum (putih) dan sesudah (Cyan) Pemetaan Bidang Tanah Bersertipikat

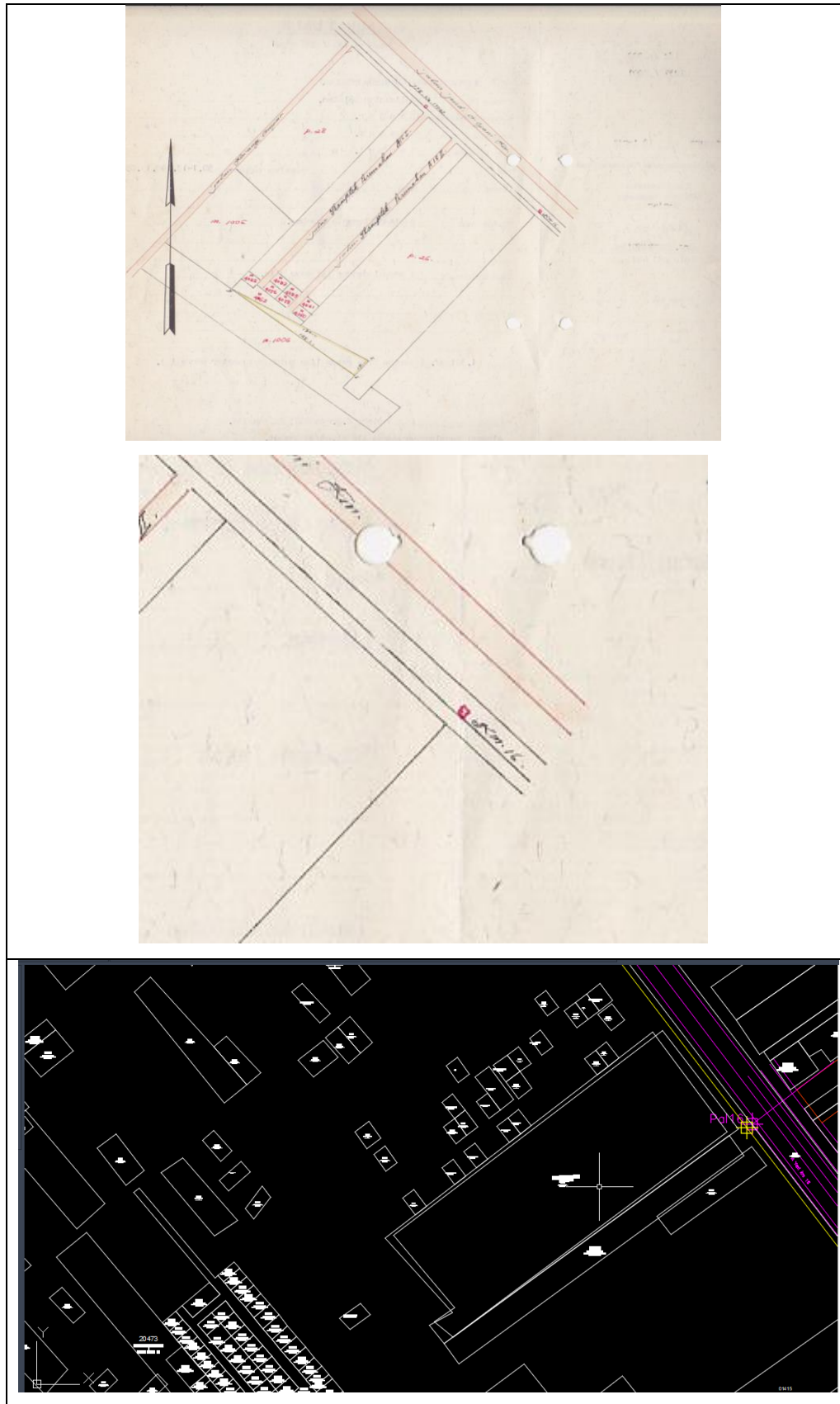
Dalam melakukan kegiatan Analisa tersebut, ketua tim ikut andil dalam membantu menganalisa bidang tanah bersertipikat agar bidang tanah tersebut dapat dipetakan lebih banyak dengan cara:

- a. memberikan data foto udara tahun lawas (2002) yang dipotret Deputy Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Pusat kelurahan Gambut, kepada para petugas Analisa pemetaan (Gambar 16).



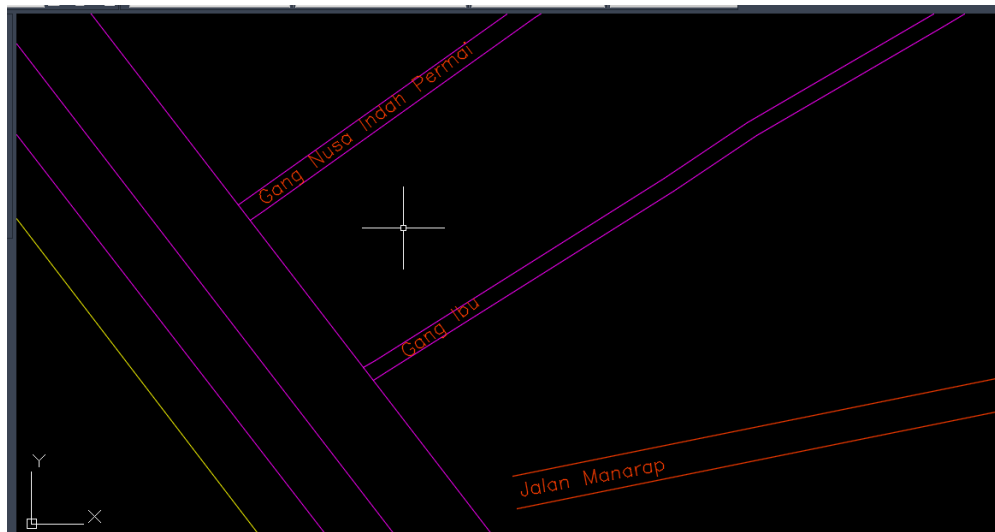
Gambar 17. Kelurahan Gambut dan Desa Gambut Barat (Dahulu Gambut)

- b. memberikan informasi mengenai tugu patok pal kilometer yang sebenarnya yang “biasa” dipakai petugas terdahulu dalam ikatan pada saat pengukuran berdasarkan penelitian lapangan (Gambar 17).



Gambar 18. Penelitian tugu Kilometer sebagai acuan di peta foto dan SU

- c. nama nama jalan yang telah disurvei oleh ketua tim pada saat menjadi kasubsi survei dan pemetaan tematik di kabupaten Banjar



Gambar 19. Pemetaan Toponimi (Nama Jalan)

- d. cara mengambil bidang tanah bersertipikat yang dapat dipetakan berdasarkan melihat data data luasan yang sama.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Kegiatan pemetaan bidang tanah terdaftar bersertipikat dikerjakan dengan sangat hati-hati berdasarkan data pada surat ukur/gambar situasi/gambar tanah yang ada tanpa harus ke lapangan. Sebenarnya proses kegiatan ini adalah seperti pengembalian batas bidang tanah dengan anggaran pengukuran yang lebih besar dibandingkan pengukuran kadastral biasa. Hanya saja yang membedakan adalah dalam kegiatan memetakan bidang tanah dilakukan sampai tahap memetaka diatas citra satelit resolusi tinggi atau ortofoto.

Manfaat lain bagi pengguna adalah kegiatan pemeliharaan data dengan adanya kegiatan aksi perubahan ini tidak perlu bersama-sama petugas ukur untuk mengecek lapangan, karena sebelum kegiatan itu dilaksanakan petugas bpn harus menganalisa pemetaan bidang tanah tersebut secara obyektif tanpa pendapat orang lain sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan data menjadi lebih singkat. ini berbanding lurus sebagaimana testimoni salah satu ppat (https://drive.google.com/file/d/13iA5nLMZH_KU0PsbJbFofG30q7vv-Ojw/view?usp=sharing) yang yang menikmati kegiatan ini tanpa harus bersama sama kelapangan untuk cek lapangan (yang tidak ada dasar hukumnya)

C. Implementasi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan

Sebagai seorang middle manager kepala seksi survei dan pemetaan diharuskan dapat mengelola bawahannya dan memberikan jawaban atau setidaknya masukkan ke atasannya dalam menyelesaikan suatu masalah.

Dalam mengelola stafnya kepala seksi tidak melulu harus hitam dan putih atau benar dan salah. Tapi bisa dilakukan Bahasa yang lain seperti lumayan dan bagus atau ok dan luar biasa sehingga bisa hasil pekerjaan staf yang bekerja tidak semuanya salah atau proporsi salahnya tidak terlalu banyak.

Dengan pembagian sistem kerja yang jelas tiap tiap stakeholder dapat bekerja dengan lebih baik

Nomor	Yang terdampak Aksi Perubahan (petugas pelaksana)	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan
1	Petugas Arsip	Kemampuan bekerja dengan sistem (Alur)	Briefing, Membaca, dan menerangkan peraturan perundangan
2	Petugas PPNPN	Kemampuan bekerja dengan Sistem	Briefing, Membaca dan menerangkan peraturan perundangan
3	Petugas Pengukuran dan Pemetaan	Kemampuan bekerja secara efektif	Briefing, Membaca peraturan dan menerapkan alur kerja secara efektif

Table 11. Perubahan/Peningkatan Kompetensi Petugas Pelaksana

Briefing dilakukan pada tiap petugas pelaksana/pekerja agar ada komunikasi dua baik sebelum-sedang-telah membaca PMA/Ka. BPN nomor 16 tahun 2021 disertai dengan mitigasinya. Briefing dalam ruangan kepala seksi diharapkan meningkatkan kemampuan para petugas pelaksana untuk bekerja dengan aturan dan bukan dengan kebiasaan. Dan dengan briefing ini juga untuk mencairkan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan

Dengan membaca Peraturan dan mitigasi dari seksi survei pemetaan diharapkan para petugas pelaksana dapat setidaknya mengetahui atau lebih dalam lagi memahami manfaat rancangan aksi perubahan ini sehingga kedepannya antara atasan dan bawahan bisa saling diskusi dan saling mengingatkan.

Khusus untuk petugas pelaksana pada bagian pengukuran dan pemetaan, diharapkan bisa melihat alur kerja secara keseluruhan dan menjalankan alur kerja yang diberikan tanggung jawabnya. Serta diharapkan dapat membuat alur kerja untuk kegiatan baru lainnya.

D. Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

Berkaitan dengan resiko dari aksi perubahan ini penulis mengikuti materi pilihan Pengawasan berbasis resiko, mengingat berdasarkan:

- penulis pernah dipanggil kejaksaan negeri dikarenakan petugas terdahulu salah plotting akibat pengukuran ulang
- surat dari inspektur jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dengan nomor surat 130/45-900.PW.05.03/IX/2023 tentang Penyampaian Laporan Hasil Audit Investigasi atas Surat Pengaduan Surat Pengaduan Treeswaty Lanny SUsatya Tanggal 8 November 2022 Hal Permohonan di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan
- Permen ATR/Ka.BPN Nomor 16 tahun 2021, pasal 43 tentang kewajian plotting
- Dan belum ada peraturan mengenai perlindungan petugas plotting bidang tanah terdaftar bersertipikat

Maka kegiatan plotting bidang tanah tersebut masih dilakukan secara offline, semata mata dikarenakan untuk melindungi petugas sekarang dari kemungkinan kesalahan petugas dahulu atau petugas sekarang yang melakukan blunder dalam melakukan pemetaan bidang tanah terdaftar bersertipikat yang bisa berakibat hukum pidana bagi pegawai yang bersangkutan. Akantetapi kegiatan pemetaan online akan dilakukan jika ada pemohon yang menyetujui lokasi bidang tanah tersebut.

E. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Penulis menyadari kompetensi yang perlu dikembangkan adalah cara berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang tersistematis tapi juga tidak menghakimi atau mengajari lawan bicara sehingga lawan bicara dapat memahami dan mengikuti apa yang penulis inginkan tanpa harus merasa tertekan.

Berdasarkan hasil Kompetensi Manajerial Sosio Kultural Hal hal yang perlu di kembangkan penulis dalam Laporan Aksi Perubahan ini adalah pengembangan kemampuan Komunikasi yang efektif baik dengan promoter, laten, aphantetic dan defendant.

Pengembangan Teknik komunikasi akan dicari di youtube agar dapat berkomunikasi yang tersistematis dengan berbagai stake holder. Diharapkan dalam jangka waktu 2 bulan dari minggu pertama sudah bisa dipraktikkan kepada tim efektif agar rancangan aksi perubahan dapat bisa diaktualisasikan dengan baik dan dapat berjalan dengan baik.

Dari kegiatan yang telah dilakukan dengan mendengar orang orang besar berbicara seperti steve jobs berbicara dengan menjawab pertanyaan yang sulit dan menghujat dapat disimpulkan bahwa ada cara lain menjawab pertanyaan yang menyerang tanpa harus menyerang balik si penanya (<https://www.youtube.com/watch?v=oeqPrUmVz-o>)

BAB IV DISEMINASI, PUBLIKASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

Berdasarkan dari kegiatan komunikasi yang dipelajari dari orang-orang besar yang berpengalaman, bersikap tenang dan logis dan berusaha merangkul penanya adalah hal yang paling baik dalam melakukan diskusi atau tanya-jawab.

Salah satu contoh komunikasi yang diterapkan oleh penulis adalah ketika penulis mengharuskan menutup berkas pengukuran ulang dikarenakan mengalami perubahan signifikan secara 1 blok yang terdiri dari 10 bidang bersertipikat sementara yang memohon pengukuran ulang 1 sertipikat. Dengan kondisi ini penulis harus bisa memberikan pemahaman kepada pemohon agar mau menutup berkasnya dengan baik (<https://drive.google.com/file/d/1ghmdVz2NPLZMs45wgmIuer6xQh0dUpel/view?usp=sharing>)

B. Keberhasilan mendapat dukungan adopsi/replikasi Aksi Perubahan

Permen ATR/Ka.BPN Nomor 16 tahun 2021, pasal 43 tentang kewajiban plotting terhadap hampir semua kegiatan turunan dari pemeliharaan data, seperti jual-beli dan lain sebagainya, maka yang akan banyak berpengaruh dari kegiatan aksi perubahan ini kedepannya adalah:

- Masyarakat pemilik tanah
- Petugas Kantor Pertanahan dengan pelayanan yang menjadi lebih cepat
- PPAT yang sedang mengurus pemeliharaan data kliennya yang dikuasakan
- Instansi pemerintah lainnya

Dukungan ini dibuktikan dengan salah satu video dari pegawai PPAT yang merasa terbantu dengan kegiatan pemetaan bidang tanah terdaftar bersertipikat (https://drive.google.com/file/d/13iA5nLMZH_KU0PsbJbFofG30q7vv-Ojw/view?usp=sharing)

Seiring jumlah bidang tanah terdaftar bersertipikat makin banyak terpetakan maka proses kegiatan pertanahan lainnya akan menjadi lebih mudah, integritas petugas pemetaan sangat dibutuhkan demi terciptanya data pertanahan yang lengkap.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Batu loncatan dalam kegiatan ini jika dilakukan dengan benar sesuai tahapan dan secara kontinu dalam jangka:

- a. Pendek (2 bulan):
 - i. Seluruh bidang tanah (inventarisasi) pada kelurahan gambut akan tercatat
 - ii. 1000 Surat ukur atau GU atau yang lainnya akan ter scan
 - iii. 1000 bidang tanah bersertipikat terpetakan
 - iv. Pelayanan pertanahan pada kelurahan Gambut diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya

Kegiatan	Agustus				September			
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1. Persiapan								
a. rapat briefing								
b. Pembentukan Tim Efektif								
c. Pembuatan Alur Kerja								
2. Implementasi								
a. Inventarisasi Bidang Tanah Bersertipikat								
b. Scan GS/GT/SU/SUS								
c. Analisa Pemetaan Bidang tanah Bersertipikat								
d. Pemetaan Bidang Tanah Bersertipikat								
3. Evaluasi								
4. Laporan								

Table 12. Time tabel kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka pendek

Dari 2 bulan, aksi perubahan yang akan dilakukan menggunakan tahapan tahapan yang akan dilakukan sebagaimana table 6.

Tahap persiapan terdiri dari rapat briefing, pembentukan tim efektif, Pembuatan Alur Kerja, yang akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu bulan Agustus.

Tahapan Implementasi yang terdiri dari pelaksanaan alur kerja yang telah dibuat dari minggu ke 3 sampai minggu ke 8.

- b. Menengah (2 tahun)
 - i. Seluruh bidang tanah di desa/kelurahan lain akan tercatat
 - ii. 50000 bidang tanah bersertipikat terpetakan
 - iii. Pelayanan pertanahan di desa dan kelurahan lainnya diharapkan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya

c. Panjang (5 tahun) adalah seluruh pelayanan pertanahan bisa dilakukan sesuai waktu di Perkebunan nomor 1 tahun 2010

Untuk huruf b dan c kegiatan dilakukan dengan berkala dikarenakan peraturan yang mewajibkan hal tersebut, sementara untuk memasukkan hasilnya secara online, diperlukan peraturan lain yang dapat melindungi petugas pemetaan yang memasukkan data secara online, karena tidak semua plotting adalah benar dan tidak semua penunjukan cek lapangan adalah benar, akan tetapi jika ditunjukkan oleh yang mempunyai sertipikat, asas pendaftaran tanah terpenuhi, akan tetapi pada beberapa kasus di gambut penunjukan pemohon justru membuat bidang tanah berubah posisi, dan petugas bpn tidak boleh sepenuhnya percaya terhadap penunjukan pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209808/permen-agrariakepala-bpn-no-16->
2. <https://www.youtube.com/watch?v=oeqPrUmVz-o>
3. https://drive.google.com/file/d/13iA5nLMZH_KU0PsbJbFofG30q7vv-Ojw/view?usp=sharing
4. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wi5UCtIWCjSF-VRa6AhOjeCgV-fqWbMDs4QTG4KfE28/edit?usp=sharing>